

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT, **Modul Laporan Keuangan : Pencatatan Transaksi Akrua**l dapat kami susun. Modul ini merupakan pedoman bagi Penyusun Laporan Keuangan di lingkungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan dalam penyusunan Laporan Keuangan, yang berisi informasi dan tata cara pencatatan transaksi akrua

Dalam rangka implementasi akuntansi akrua yang mulai diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan menghadirkan tantangan tersendiri. Untuk itu, modul ini kami tujukan kepada seluruh penyusun Laporan Keuangan khususnya pada Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan untuk mempermudah pemahaman dalam menghadapi setiap transaksi-transaksi akrua yang kerap ditemukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Ditjen GTK serta tata cara pencatatannya.

Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan modul ini. Penyusunan petunjuk teknis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang membangun ke arah penyempurnaan kami terima dengan tangan terbuka.

Akhirnya, mudah-mudahan modul ini dapat berguna dan membantu siapa saja yang menggunakan untuk terwujudnya laporan keuangan secara wajar dan andal.

Jakarta, 22 Mei 2018

Tim Penyusun

1. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Kas di Bendahara Penerimaan adalah saldo uang tunai dan saldo di rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Penerimaan kas melalui Satker diakui pada saat diterima kas tunai oleh Bendahara, jadi apabila per tanggal pelaporan (30 Juni 20XX atau 31 Desember 20XX) masih terdapat saldo uang tunai dan saldo di rekening bank Bendahara Penerimaan maka harus dicatat sebagai nilai pos ***Kas di Bendahara Penerimaan*** pada **NERACA**.

Nilai saldo dapat dilihat pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ataupun rekening koran Bendahara Penerimaan per tanggal pelaporan dengan contoh sebagai berikut:

LAPORAN TRANSAKSI

Kepada Yth.
 BPPN 022 PPPPTK IPA BDG 361161
 JL. DEPENOGORO NO 12 BANDUNG
 40131/01
 LAINNYA LAINNYA LAINNYA

Tanggal Laporan : 04/04/17
 Periode Transaksi : 01/12/16 - 31/12/16
 Halaman : 1

No. Rekening : 000501002143305
 No. Kartu :
 Nama Produk : Gro Rak Pemerintah
 Mata Uang : IDR

Unit Kerja : Bandung AA
 Alamat Unit Kerja : Jl. Asia Afrika No. 57-59
 Bandung

Urutan Transaksi	Uraian Transaksi	Chg No	Debet	Kredit	Saldo	Teller
	SALDO				3,113.00K	

SALDO AWAL	TOTAL MUTASI DEBIT	TOTAL MUTASI KREDIT	SALDO AKHIR
3,113.00K	0.00	0.00	3,113.00K

TIGA RIBU SERATUS TIGA BELAS RUPIAH

Biaya materai telah dibayar Lunas

Apabila terdapat perbedaan dengan catatan Saudara, harap menghubungi kami selambat-lambatnya 14 hari sejak diterimanya rekening koran ini.
 Laporan rekening koran ini merupakan hasil cetakan komputer, tidak diperlukan tanda tangan pejabat Bank.
 Apabila ada perubahan alamat email, mohon diinformasikan pada Unit Kerja BANK BRI

Apabila terdapat nilai saldo di rekening bank atau di brankas Bendahara Penerimaan berupa PNPB yang belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal pelaporan, maka nilai tersebut dicatat di Aplikasi SAIBA melalui menu **Jurnal Penyesuaian** dengan menggunakan kategori **"Kas di Bendahara Penerimaan"** dan jurnal sebagai berikut:

D	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx
K	425XXX	Pendapatan	xxx

Contoh:

Satker ABC per 31 Desember 2017 terdapat pendapatan sewa asrama yang belum disetorkan ke Kas Negara senilai Rp5.000.000,00 yang masih berada di rekening Bendahara Penerimaan. Untuk pencatatan di Laporan Keuangan diinput secara manual dalam Jurnal Penyesuaian di Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	5.000.000
K	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	5.000.000

2. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Sumber dari saldo tersebut antara lain:

- Jasa Giro yang belum disetorkan ke Kas Negara
- Pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara
- Pengembalian belanja yang belum disetorkan ke Kas Negara
- Belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga

Atas saldo tersebut, per tanggal pelaporan harus dicatat sebagai nilai pos ***Kas Lainnya dan Setara Kas*** pada **NERACA**. Perlakuan atas keempat sumber saldo di atas memerlukan pencatatan yang berbeda-beda, yaitu:

a. ***Jasa Giro yang belum disetorkan ke Kas Negara***

Rekening Pemerintah dengan peruntukkan pengelolaan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan secara otomatis diterapkan *Treasury Notional Pooling* (TNP) yang berarti Jasa Giro atas rekening langsung di *auto debet* ke rekening Kas Negara sehingga tidak ada setoran ke Kas Negara melalui SSBP. Tetapi berbeda dengan Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) dimana penerapan TNP menjadi hak dari Satker sehingga

memungkinkan munculnya Jasa Giro atas rekening pemerintah. Atas hal tersebut seringkali masih terdapat saldo jasa giro di rekening sehingga muncul pada LPJ Bendahara Pengeluaran seperti contoh berikut:

Form LPJ Pengeluaran	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN		Tahun Anggaran		
	Bulan : [REDACTED]		2017		
Kementerian/Lembaga :	(023)	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
Unit Organisasi :	(16)	DITJEN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
Provinsi/Kab/Kota :	(53)	KOTA MALANG			
Satuan Kerja :	[REDACTED]				
Alamat dan Telp. :	[REDACTED]				
No Krws & Kewenangan :	(0001.KD)	Kantor Daerah			
Dokumen :	(01)	DIPA			
Nomor Dokumen :	[REDACTED]				
Tanggal Dokumen :	07-12-2016				
Tahun Anggaran :	2017				
KPPN :	[REDACTED]				
I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 6.715.132.000 dan Nomor Bukti terakhir Nomor:001559					
No.	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BP Kas, BPP, dan UM Perjadin	500.000.000	16.428.275.077	10.213.143.077	6.715.132.000
	1. BP Kas (tunai dan bank)	5.000.000	11.928.275.077	9.000.000.000	2.933.275.077
	2. BP Uang Muka/Voucher	495.000.000	4.500.000.000	1.213.143.077	3.781.856.923
	3. BP BPP (Kas pada BPP)	0	0	0	0
B.	BP selain Kas, BPP, dan UM Perjadin	500.000.000	7.424.941.697	1.209.809.697	6.715.132.000
	1. BP UP *)	500.000.000	7.269.541.697	1.209.809.697	6.559.732.000
	2. BP LS-Bendahara	0	0	0	0
	3. BP Pajak	0	0	0	0
	4. BP Lain-lain	0	155.400.000	0	155.400.000

Atas saldo tersebut dicatat di Aplikasi SAIBA melalui menu **Jurnal Penyesuaian** dengan menggunakan kategori "**Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran**" dan jurnal sebagai berikut:

D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxx
K	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	xxx

Contoh:

LPJ pada Satker ABC per 31 Desember 2017 terdapat Jasa Giro yang belum disetorkan ke Kas Negara senilai Rp3.000.000,00 yang masih berada di rekening Bendahara Pengeluaran. Untuk pencatatan di Laporan Keuangan diinput secara manual dalam Jurnal Penyesuaian di Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	3.000.000
K	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	3.000.000

b. Pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, pada Pasal 2 disebutkan bahwa PPh Pasal 22, PPN dan PPhBM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran, harus disetor **paling lama 7 (tujuh)** hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah. Tetapi pada prakteknya sering terdapat setoran pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara pada akhir tanggal pelaporan (30 Juni 20XX atau 31 Desember 20XX) dikarenakan adanya kegiatan yang dilaksanakan mendekati akhir tanggal pelaporan.

Atas hal tersebut seringkali masih terdapat saldo pajak yang belum disetorkan sehingga muncul pada LPJ Bendahara Pengeluaran seperti contoh berikut:

Form LPJ Pengeluaran	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN Bulan : Desember 2017	Tahun Anggaran 2017
---------------------------------	---	--------------------------------

Kementerian/Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 Unit Organisasi : (16) DITJEN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
 Provinsi/Kab/Kota :
 Satuan Kerja :
 Alamat dan Telp. :
 No Krws & Kewenangan: (0001.KD) Kantor Daerah
 Dokumen : (01) DIPA
 Nomor Dokumen :
 Tanggal Dokumen :
 Tahun Anggaran : 2017
 KPPN : (088) JAKARTA III

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 106.120.033 dan Nomor Bukti terakhir Nomor:001090

No.	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BP Kas, BPP, dan UM Perjadin	710.859.115	36.188.873.092	36.793.612.174	106.120.033
	1. BP Kas (tunai dan bank)	235.859.115	36.188.873.092	36.318.612.174	106.120.033
	2. BP Uang Muka/Voucher	475.000.000	0	475.000.000	0
	3. BP BPP (Kas pada BPP)	0	0	0	0
B.	BP selain Kas, BPP, dan UM Perjadin	710.859.115	18.027.450.123	18.632.189.205	106.120.033
	1. BP UP *)	500.000.000	5.148.075.469	5.640.595.469	7.480.000
	2. BP LS-Bendahara	0	11.980.882.500	11.980.882.500	0
	3. BP Pajak	210.859.115	341.027.154	453.246.236	98.640.033
	4. BP Lain-lain	0	557.465.000	557.465.000	0

Atas saldo tersebut dicatat di Aplikasi SAIBA melalui menu **Jurnal Penyesuaian** dengan menggunakan kategori "**Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran**" dan jurnal sebagai berikut:

D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxx
K	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	xxx

Contoh:

LPJ pada Satker ABC per 31 Desember 2017 terdapat BP Pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara senilai Rp10.000.000,00 yang masih berada di penguasaan Bendahara Pengeluaran. Untuk pencatatan di Laporan Keuangan diinput secara manual dalam Jurnal Penyesuaian di Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	10.000.000
K	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	10.000.000

c. Pengembalian Belanja yang belum disetorkan ke Kas Negara

Sama halnya dengan pajak, pada akhir tanggal pelaporan sering terdapat pengembalian belanja atas LS yang belum disetorkan ke Kas Negara. Atas sisa tersebut disetorkan melalui SSBP pada Tahun Anggaran berikutnya, tetapi secara akrual transaksi tersebut seharusnya membebani Tahun Anggaran berjalan.

Misalnya, pada Tahun 2017 terdapat realisasi Belanja Jasa Profesi Rp20.000.000,00 dan per 31 Desember 2017 masih terdapat pengembalian belanja Jasa Profesi Rp1.500.000,00 yang belum disetorkan ke Kas Negara serta baru disetorkan pada tanggal 2 Januari 2018. Pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017, secara basis Kas realisasi Belanja Jasa Profesi adalah Rp20.000.000,00 dengan tidak memperhitungkan pengembalian belanja Rp1.500.000,00 karena setoran dilakukan pada Tahun 2018. Tetapi pada Laporan Operasional Tahun 2017, secara akrual realisasi Beban Jasa Profesi hanya akan tercatat Rp18.500.000,00 (Rp20.000.000,00 – Rp1.500.000,00) dikarenakan pengembalian belanja LS dianggap sebagai pengurang realisasi Tahun 2017.

Contoh saldo sisa BP LS yang belum disetorkan sehingga muncul pada LPJ Bendahara Pengeluaran seperti contoh berikut:

Form LPJ Pengeluaran	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN Bulan : Maret 2017			Tahun Anggaran 2017	
Kementerian/Lembaga : (023)	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
Unit Organisasi : (16)	DITJEN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
Provinsi/Kab/Kota : (54)	KOTA JAKARTA SELATAN				
Satuan Kerja :					
Alamat dan Telp. :					
No Krws & Kewenangan : (0001.KD)	Kantor Daerah				
Dokumen : (01)	DIPA				
Nomor Dokumen :					
Tanggal Dokumen : 07-12-2016					
Tahun Anggaran : 2017					
KPPN : (088)	JAKARTA III				
I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 936.678.910 dan Nomor Bukti terakhir Nomor:000115					
No. (1)	Jenis Buku Pembantu (2)	Saldo Awal (3)	Penambahan (4)	Pengurangan (5)	Saldo Akhir (6)
A.	BP Kas, BPP, dan UM Perjadin	344.049.928	5.203.013.881	4.610.384.899	936.678.910
	1. BP Kas (tunai dan bank)	344.049.928	5.203.013.881	4.610.384.899	936.678.910
	2. BP Uang Muka/Voucher	0	0	0	0
	3. BP BPP (Kas pada BPP)	0	0	0	0
B.	BP selain Kas, BPP, dan UM Perjadin	344.049.928	2.906.792.275	2.314.163.293	936.678.910
	1. BP UP *)	342.555.616	632.832.309	704.149.275	271.238.650
	2. BP LS-Bendahara	0	1.805.443.000	1.144.218.000	661.225.000
	3. BP Pajak	1.494.312	22.295.360	19.574.412	4.215.260
	4. BP Lain-lain	0	446.221.606	446.221.606	0

Atas saldo tersebut dicatat di Aplikasi SAIBA melalui menu **Jurnal Penyesuaian** dengan menggunakan kategori "**Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran**" dan jurnal sebagai berikut:

D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxx
K	52XXX	Beban	xxx

Contoh:

LPJ pada Satker ABC per 31 Desember 2017 terdapat sisa LS BP Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota yang belum disetorkan ke Kas Negara senilai Rp7.000.000,00 yang masih berada di penguasaan Bendahara Pengeluaran. Untuk pencatatan di Laporan Keuangan diinput secara manual dalam Jurnal Penyesuaian di Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	7.000.000
---	--------	--------------------------------------	-----------

K	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.000.000
---	--------	-----------------------------------	-----------

d. Belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga

Hampir sama dengan penjelasan sebelumnya, saldo ini merupakan BP LS tetapi tidak tidak disetorkan ke Kas Negara melainkan disalurkan ke Pihak Ketiga. Saldo ini sama-sama akan muncul pada pos BP LS di LPJ Bendahara Pengeluaran. **Untuk itu perlu dilakukan konfirmasi ke Bendahara Pengeluaran mengenai saldo dari pos BP LS yang muncul di LPJ apakah nilai tersebut merupakan sisa LS BP yang akan disetorkan ke Kas Negara atau akan disalurkan ke pihak ketiga karena pencatatan akuntansinya akan berbeda.**

Atas saldo tersebut dicatat di Aplikasi SAIBA melalui menu **Jurnal Penyesuaian** dengan menggunakan kategori "**Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran**" dan jurnal sebagai berikut:

D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxx
K	212191	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	xxx

Contoh:

1. Satker ABC per 31 Desember 2017 terdapat LS BP Belanja Honor untuk 4 orang Satpam yang belum disalurkan senilai Rp9.000.000,00 yang masih berada di penguasaan Bendahara Pengeluaran. Untuk pencatatan di Laporan Keuangan diinput secara manual dalam Jurnal Penyesuaian di Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	9.000.000
K	212191	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	9.000.000

2. Satker ABC per 31 Desember 2017 terdapat dana Tunjangan Profesi Guru Non PNS kepada 1.250 orang guru yang belum disalurkan dan masih tersimpan dalam Rekening Bank Penyalur senilai Rp200.000.000,00. Untuk pencatatan di Laporan Keuangan diinput secara manual dalam Jurnal Penyesuaian di Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	200.000.000
K	212191	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	200.000.000

3. BELANJA DIBAYAR DIMUKA

Belanja Dibayar Dimuka merupakan piutang yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati oleh Pemerintah. Sumber dari saldo tersebut dapat berasal dari:

- Kelebihan atas Pembayaran Realisasi Belanja
- LPJ Bantuan Pemerintah yang Belum Disampaikan oleh Penerima

Atas saldo tersebut, per tanggal pelaporan harus dicatat sebagai nilai pos ***Beban Dibayar Dimuka*** pada **NERACA**. Perlakuan atas keempat sumber saldo di atas memerlukan pencatatan yang berbeda-beda, yaitu:

a. Kelebihan atas Pembayaran Realisasi Belanja

Dalam proses pencairan anggaran terkadang terdapat kesalahan perhitungan hak bayar yang seharusnya diterima oleh penerima disebabkan karena *human error* dari Bendahara Pengeluaran ataupun Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada saat pengajuan SPP/SPM. Ditjen GTK memiliki tugas untuk menyalurkan Aneka Tunjangan untuk guru Non PNS kepada ribuan guru. Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan perhitungan penyaluran tunjangan kepada guru yang bersangkutan yang mengakibatkan kelebihan ataupun pembayaran ganda kepada guru yang sama.

Atas hal tersebut, kelebihan pembayaran tersebut dianggap sebagai **Belanja Dibayar Dimuka** dikarenakan Pemerintah belum menerima hak jasa yang harus diberikan oleh

guru. Nilai tersebut dicatat di Aplikasi SAIBA melalui menu **Jurnal Penyesuaian** dengan menggunakan kategori "**Beban Dibayar Dimuka**" dan jurnal sebagai berikut:

D	114111	Beban Pegawai Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	xxx
K	5XXXX	Beban	xxx

Contoh:

Satker ABC per 31 Desember 2017 terdapat kelebihan pembayaran Tunjangan Profesi Guru Non PNS senilai Rp1.100.000.000,00 kepada 300 orang guru. Untuk pencatatan di Laporan Keuangan diinput secara manual dalam Jurnal Penyesuaian di Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D	114111	Beban Pegawai Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	1.100.000.000
K	511152	Beban Tunjangan Profesi Guru	1.100.000.000

b. LPJ Bantuan Pemerintah yang Belum Disampaikan oleh Penerima

Dalam pelaksanaan kegiatan, Satker di lingkungan Ditjen GTK terutama Satker Pusat, P4TK, LPPPTK dan LPPKS menyalurkan berbagai Bantuan Pemerintah kepada guru, Kelompok Kerja, Pusat Belajar, Dinas Pendidikan Provinsi, dan sebagainya. Bantuan yang disalurkan merupakan kegiatan-kegiatan dalam menunjang kesejahteraan, peningkatan kompetensi, dan pengembangan keprofesian guru.

Berdasarkan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016** tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga, bahwa setiap penerima Bantuan Pemerintah diharuskan untuk memberikan Laporan Pertanggungjawaban kepada pemberi bantuan sebagai pertanggungjawaban dana bantuan yang dikelola.

Seringkali sampai dengan akhir bulan Desember tahun berjalan masih terdapat penerima Bantuan Pemerintah yang belum menyampaikan LPJ Bantuan kepada Satker pemberi

Bantuan, hal ini menyebabkan dana bantuan tersebut belum dapat diakui pertanggungjawabannya sehingga harus diakui sebagai pos **Belanja Dibayar Dimuka** pada **Neraca**. Nilai tersebut dicatat di Aplikasi SAIBA melalui menu **Jurnal Penyesuaian** dengan menggunakan kategori "**Beban Dibayar Dimuka**" dan jurnal sebagai berikut:

D	114112	Beban Barang Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	xxx
K	5XXXX	Beban (beban yang digunakan saat pencairan Bantuan Pemerintah, misalnya Beban Non Operasional)	xxx

Contoh:

Pada Tahun 2017 Satker ABC menyalurkan Bantuan Pemerintah dengan menggunakan MAK Belanja Non Operasional (521219) kepada 10 Kelompok Kerja Guru (KKG) masing-masing Rp15.000.000,00 sehingga total penyaluran adalah Rp150.000.000,00. Per 31 Desember 2017, sebanyak 2 KKG belum menyampaikan LPJ nya senilai Rp30.000.000,00 sehingga harus diakui sebagai Belanja Dibayar Dimuka. Untuk pencatatan di Laporan Keuangan diinput secara manual dalam Jurnal Penyesuaian di Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D	114112	Beban Barang Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	30.000.000
K	521219	Beban Non Operasional	30.000.000

4. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum disampaikan tagihannya. Berbeda dengan basis kas, basis akrual menghendaki pengakuan atas jasa yang telah diberikan walaupun pembayaran atas jasa tersebut belum diterima. Hal ini mungkin terjadi di Satker P4TK, LP3TK dan LPPKS yang menyewakan asrama atau aula ke pihak ketiga dimana pembayaran dimungkinkan terlambat diterima. Untuk mendapatkan data tersebut dapat dilakukan konfirmasi kepada Bendahara Penerimaan apakah terdapat tagihan sewa pihak ketiga yang belum diterima.

Dikarenakan pelayanan telah diberikan tetapi tagihan belum disampaikan maka jumlah tagihan tersebut harus diakui sebagai pos **Pendapatan yang Masih Harus Diterima** dalam **Neraca**. Nilai tersebut dicatat di Aplikasi SAIBA melalui menu **Jurnal Penyesuaian** dengan menggunakan kategori "**Pendapatan yang Masih Harus Diterima**" dan jurnal sebagai berikut:

D	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	xxx
K	425XXX	Pendapatan (Pendapatan sesuai jenis pendapatan yang akan diterima)	xxx

Contoh:

Pada tanggal 29 s.d. 31 Desember 2017 Satker ABC menyewakan asrama kepada pihak ketiga senilai Rp6.600.000. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 penyewa belum membayar biaya sewa asrama tersebut dan baru membayarnya pada tanggal 5 Januari 2018. Untuk pencatatan di Laporan Keuangan diinput secara manual dalam Jurnal Penyesuaian di Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	6.600.000
K	425131	Pendapatan Sewa, Tanah, dan Bangunan	6.600.000

5. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Beban yang Masih Harus Dibayar merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. *Apakah perbedaan antara Beban yang Masih Harus Dibayar dengan Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya?* Bila Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya merupakan hak pihak ketiga yang **sudah direalisasikan namun belum disalurkan**, maka Beban yang Masih Harus Dibayar merupakan hak pihak ketiga yang **belum direalisasikan sama sekali**.

Beban yang Masih Harus Dibayar dibagi menjadi 3 (tiga) jenis sesuai dengan kategori belanjanya, yaitu:

- Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar
- Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar
- Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar

Penjelasan atas masing-masing jenis Beban yang Masih Harus Dibayar adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar

Belanja Pegawai yang Masih Harus dibayar merupakan hak pihak ketiga berupa gaji susulan, uang makan, *carry over* tunjangan atau komponen lainnya yang termasuk Belanja Pegawai yang belum dibayarkan dan direalisasikan. Nilai tersebut dicatat di Aplikasi SAIBA melalui menu **Jurnal Penyesuaian** dengan menggunakan kategori **“Beban yang Masih Harus Dibayar”** dan jurnal sebagai berikut:

D	51XXXX	Beban	xxx
K	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	xxx

Contoh:

Pada 31 Desember 2017 diketahui Satker ABC masih mempunyai **uang makan bulan Desember** yang belum dibayarkan untuk semua pegawainya sebesar Rp15.000.000,00. Selain itu terdapat **gaji susulan** untuk 1 orang pegawai sebesar Rp2.500.000,00 dan terdapat **carry over Tunjangan Profesi Tahun 2017** untuk 100 orang guru Non PNS senilai Rp600.000.000,00 yang belum terbayarkan dan baru akan dibayarkan pada Tahun 2018. Untuk pencatatan di Laporan Keuangan diinput secara manual **secara terpisah** dalam Jurnal Penyesuaian di Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D	511129	Beban Uang Makan PNS	15.000.000
K	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	15.000.000

D	511129	Beban Gaji Pokok PNS	2.500.000
---	--------	----------------------	-----------

K	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	2.500.000
---	--------	--	-----------

D	511152	Beban Tunjangan Profesi Guru	600.000.000
K	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	600.000.000

b. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar

Belanja Barang yang Masih Harus dibayar merupakan hak pihak ketiga berupa langganan daya dan jasa, honorarium, biaya akomodasi atau komponen lainnya yang termasuk Belanja Barang yang belum dibayarkan dan direalisasikan. Nilai tersebut dicatat di Aplikasi SAIBA melalui menu **Jurnal Penyesuaian** dengan menggunakan kategori "**Beban yang Masih Harus Dibayar**" dan jurnal sebagai berikut:

D	52XXXX	Beban	xxx
K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	xxx

Contoh:

Pada 31 Desember 2017 diketahui Satker ABC memiliki tagihan pemakaian listrik, telepon dan internet bulan Desember yang belum dibayar dikarenakan tagihannya baru terbit bulan Januari 2018 sehingga pembayaran tagihan tersebut dibayar menggunakan DIPA Tahun 2018. Tagihan listrik senilai Rp4.000.000,00, tagihan telepon senilai Rp1.500.000,00 dan tagihan internet senilai Rp3.000.000,00. Untuk pencatatan di Laporan Keuangan diinput secara manual **secara terpisah** dalam Jurnal Penyesuaian di Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D	522111	Beban Langganan Listrik	4.000.000
K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	4.000.000

D	522112	Beban Langganan Telepon	1.500.000
---	--------	-------------------------	-----------

K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	1.500.000
---	--------	---	-----------

D	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3.000.000
K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	3.000.000

c. Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar

Belanja Modal yang Masih Harus dibayar merupakan hak pihak ketiga berupa tunggakan atas pembangunan atau pengembangan Belanja Modal yang belum dibayarkan dan direalisasikan. Pekerjaan pembangunan yang dilakukan oleh pihak ketiga telah selesai dilakukan dan telah dilakukan serah terima melalui BAST, tetapi karena satu dan lain hal penagihan tidak dapat dilakukan sehingga hak pihak ketiga tidak terbayarkan pada tahun berjalan.

Berbeda dengan Belanja Pegawai dan Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar, pencatatan Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar memerlukan perlakuan khusus dikarenakan berhubungan dengan pencatatan Aplikasi SIMAK-BMN.

Pada saat pekerjaan pembangunan telah selesai, maka Operator SIMAK-BMN akan mencatat pada Aplikasi SIMAK-BMN sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut: (misalnya pekerjaan yang dilakukan adalah pembangunan Gedung Asrama)

D	133111	Gedung dan Bangunan	xxx
K	133211	Gedung dan Bangunan yang Belum Diregister	xxx

Dikarenakan tidak ada realisasi yang terbentuk di Aplikasi SAIBA, maka saat dilakukan rekonsiliasi dengan SIMAK-BMN maka akan muncul nilai Gedung dan Bangunan yang Belum Diregister bersaldo minus di Neraca SAIBA.

Untuk menyeimbangkan nilai tersebut, dilakukan pencatatan di Aplikasi SAIBA melalui menu **Jurnal Umum** dengan jurnal sebagai berikut:

D	133211	Gedung dan Bangunan yang Belum Diregister	xxx
K	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	xxx

Contoh:

Pada tanggal 10 Desember 2017 diketahui PT. XYZ telah menyelesaikan pembangunan Gedung Kantin pada Satker ABC senilai Rp214.617.250,00 dan telah di BAST kan per tanggal 11 Desember 2017. Karena Operator SPM berhalangan, Satker ABC terlambat mengajukan SPM atas tagihan tersebut ke KPPN sampai akhir pengajuan LS sehingga kontrak pekerjaan tersebut tidak terbayarkan. Operator SIMAK-BMN akan mencatat pada Aplikasi SIMAK-BMN per tanggal 11 Desember 2017 sehingga terbentuk jurnal kirim ke Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D	133111	Gedung dan Bangunan	214.617.250
K	133211	Gedung dan Bangunan yang Belum Diregister	214.617.250

Dikarenakan tidak ada SPM/SP2D di Aplikasi SAIBA terkait realisasi pekerjaan tersebut maka akan muncul nilai Gedung dan Bangunan yang Belum Diregister senilai minus Rp214.617.250,00 pada Neraca seperti tampak pada gambar dibawah ini:

**NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan: NSAIET
Tanggal : 24/05/2018
Halaman : 1

KE MENTERIAN NE GARA/LEMBAGA : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT ORGANISASI : 16 DITJEN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
WILAYAH/PROPINSI :
SATUAN KERJA :
JENIS KEWENANGAN :

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2017	2016	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Penerimaan	59,650,000	0	59,650,000	0.00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	719,414,100	0	719,414,100	0.00
Persediaan	90,675,125	132,586,465	(41,911,340)	(31.61)
JUMLAH ASET LANCAR	869,739,225	132,586,465	737,152,760	555.97
ASET TETAP				
Tanah	22,549,510,000	22,549,510,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	24,204,720,880	22,351,057,880	1,853,663,000	8.29
Gedung dan Bangunan	28,750,400,285	28,978,258,285	(227,858,000)	(0.78)
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	(214,617,250)	0	(214,617,250)	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3,973,510,100	3,978,088,527	(4,578,427)	(0.11)
Aset Tetap Lainnya	299,166,860	299,166,860	0	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	4,780,903,500	0	4,780,903,500	0.00
Akumulasi Penyusutan	(30,665,797,300)	(28,486,834,431)	(2,178,962,869)	7.64

Untuk itu, Operator SAIBA melakukan penjurnal melalui Jurnal Umum untuk menyeimbangkan nilai tersebut dan mengakuinya sebagai Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar. Jurnal yang dibentuk dalam Aplikasi SAIBA adalah sebagai berikut:

D	133211	Gedung dan Bangunan yang Belum Diregister	214.617.250
K	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	214.617.250

Dengan munculnya nilai Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar akan menjadi dasar agar bisa dianggarkan di DIPA Tahun yang akan datang sehingga pembayaran kepada pihak ketiga dapat dilakukan. Neraca yang tampil pada saat jurnal selesai diinput adalah sebagai berikut:

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan : NSAJELT
Tanggal : 24/05/2018
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT ORGANISASI : 16 DITJEN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
WILAYAH/PROVINSI : 0100 DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : 381182 P4TK BAHASA

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2017	2016	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Penerimaan	58,650,000	0	58,650,000	0.00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	719,414,100	0	719,414,100	0.00
Persediaan	90,875,125	132,588,485	(41,911,340)	(31.81)
JUMLAH ASET LANCAR	868,939,225	132,588,485	737,152,760	555.97
ASET TETAP				
Tanah		22,548,510,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin		22,351,057,880	1,853,883,000	8.29
Gedung dan Bangunan	28,750,400,285	28,978,258,285	(227,858,000)	(0.78)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3,973,510,100	3,978,088,527	(4,578,427)	(0.11)
Aset Tetap Lainnya	288,166,860	288,166,860	0	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	4,780,903,500	0	4,780,903,500	0.00
Akumulasi Penyusutan	(30,885,797,300)	(28,488,834,431)	(2,178,982,889)	7.84
JUMLAH ASET TETAP	53,892,444,325	49,889,247,121	4,223,167,204	8.50
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	883,425,150	883,425,150	0	0.00
Aset Lain-lain	838,275,000	3,742,858,480	(3,104,381,480)	(82.94)
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(1,400,430,150)	(4,348,754,349)	2,948,324,199	(87.79)
JUMLAH ASET LAINNYA	121,270,000	277,459,281	58,270,000	58.27
JUMLAH ASET	54,883,423,550	50,079,992,887	4,803,430,663	9.59
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	214,617,250	92,865,503	121,781,747	131.13

7. PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Untuk persediaan barang-barang operasional kegiatan, persediaan tidak dapat dilihat dari bentuk barangnya, melainkan niat awal (*intention*) pada saat penyusunan perencanaan kegiatan dan penyusunan RKAKLnya, sehingga untuk barang-barang yang memang direncanakan habis pada satu kegiatan tidak dialokasikan dari Belanja Barang Persediaan dan tidak menjadi persediaan. Suatu barang dapat digolongkan sebagai barang persediaan apabila perencanaan pengadaan barang tersebut bersifat kontinu atau berkelanjutan, tidak hanya untuk satu kali kegiatan saja dalam jangka waktu pendek.

Ilustrasi penggunaan MAK untuk pengadaan barang Persediaan sesuai dengan Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-6478/PB.6/2015 tanggal 3 Agustus 2015 perihal Penggunaan Akun Belanja yang Menjadi Persediaan adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	KLASIFIKASI	KETERANGAN
1.	Pengadaan seminar kit untuk peserta diklat yang dapat dipakai untuk beberapa kali kegiatan diklat.	Belanja Barang Persediaan Konsumsi (521811)	<ul style="list-style-type: none"> – perencanaan pengadaan secara kontinu / berkelanjutan – tidak habis dalam sekali kegiatan diklat
2.	Pengadaan seminar kit untuk kegiatan Bimtek Aplikasi SAIBA	Belanja Bahan (521211)	<ul style="list-style-type: none"> – perencanaan pengadaan hanya untuk satu kali kegiatan saja. – hanya dalam sekali kegiatan sosialisasi.
3.	Pengadaan perlengkapan gedung seperti engsel pintu, kunci, lampu, dll untuk pemeliharaan gedung kantor	Belanja Barang Persediaan untuk Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523112)	<ul style="list-style-type: none"> – tidak habis dalam sekali pakai, sifatnya cadangan atau berjaga-jaga
4.	Service rutin dan ganti oli untuk kendaraan dinas dibengkel resmi	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121)	<ul style="list-style-type: none"> – habis dalam sekali pakai
5.	Pembelian oli pelumas dan BBM untuk peralatan genset	Belanja Barang Persediaan Untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523123)	<ul style="list-style-type: none"> – tidak habis dalam sekali pakai, sifatnya cadangan atau berjaga-jaga.

Tetapi dalam prakteknya sering terdapat kesalahan-kesalahan yang terjadi terkait penatausahaan pengadaan barang Persediaan terutama terkait MAK yang digunakan pada saat pencairan. Permasalahan yang sering muncul antara lain:

- Akun belanja Barang Persediaan yang digunakan bukan untuk pengadaan Barang Persediaan tetapi untuk beban yang lain ataupun untuk pengadaan Barang Persediaan yang sifatnya tidak kontinu.
- Akun Belanja Modal yang digunakan untuk perolehan Barang Persediaan.

Penjelasan atas masing-masing permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Akun belanja Barang Persediaan yang digunakan bukan untuk pengadaan Barang Persediaan tetapi untuk beban yang lain ataupun untuk pengadaan Barang Persediaan yang sifatnya tidak kontinu

Pada saat pencatatan realisasi MAK Belanja Barang yang menghasilkan Persediaan (MAK 521811, 523112, 523121, 523123) maka secara otomatis akan terbentuk saldo Persediaan yang Belum Diregister pada Neraca di Aplikasi SAIBA. Karena pengeluaran ini tidak digunakan untuk perolehan Persediaan namun untuk beban yang lain atau ternyata menghasilkan barang Persediaan yang sifatnya tidak kontinu, maka realisasi ini tidak dapat diinput dalam Aplikasi Persediaan sehingga pada saat dilakukan rekonsiliasi internal antara SAIBA dan SIMAK-BMN saldo Persediaan yang Belum Diregister tidak akan tereliminasi secara otomatis. **Atas hal ini seharusnya Satker melakukan revisi anggaran atau ralat dokumen SPM ke KPPN setempat sebelum akhir tahun anggaran.**

Jika sampai dengan akhir periode pelaporan dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja maka dilakukan jurnal di Aplikasi SAIBA melalui menu **Jurnal Umum** dengan jurnal sebagai berikut:

D	52XXXX	Beban	xxx
K	117911	Persediaan yang Belum Diregister	xxx

Sebaliknya, bila terdapat MAK Belanja Barang yang tidak menghasilkan Persediaan (MAK selain 521811, 523112, 523121, 523123) yang ternyata menghasilkan Barang Persediaan dan dicatat di Aplikasi Persediaan, maka secara otomatis pada saat dilakukan rekonsiliasi internal akan terbentuk saldo minus pada pos Persediaan yang Belum Diregister di Neraca. Guna mengeliminasi saldo tersebut maka dilakukan jurnal di Aplikasi SAIBA melalui menu **Jurnal Umum** dengan jurnal sebagai berikut:

D	117911	Persediaan yang Belum Diregister	xxx
K	52XXXX	Beban	xxx

Contoh:

1. Satker ABC masih memiliki realisasi MAK 521811 (Belanja Barang Persediaan Konsumsi) senilai Rp6.000.000,00 yang ternyata tidak menjadi Barang Persediaan (tidak bersifat kontinu/rutin) dan sampai akhir tahun anggaran tidak dilakukan ralat atas dokumen SPM dimaksud (seharusnya dikategorikan sebagai Belanja Bahan 521211). Karena tidak digolongkan sebagai Barang Persediaan, maka Operator Persediaan menolak untuk menginput dalam Aplikasi Persediaan sehingga di Neraca SAIBA muncul Persediaan yang Belum Diregister Rp6.500.000,00. Atas hal tersebut, maka dilakukan pencatatan jurnal pada Aplikasi SAIBA untuk mengeliminasi Persediaan yang Belum Diregister dan mencatat beban yang seharusnya.

D	521211	Beban Bahan	6.500.000
K	117911	Persediaan yang Belum Diregister	6.500.000

2. Satker ABC masih memiliki realisasi MAK 521111 (Belanja Keperluan Perkantoran) senilai Rp1.500.000,00 yang ternyata menjadi Barang Persediaan (bersifat kontinu/rutin) dan sampai akhir tahun anggaran tidak dilakukan ralat atas dokumen SPM dimaksud (seharusnya dikategorikan sebagai Belanja Persediaan Konsumsi 5218111). Karena digolongkan sebagai Barang Persediaan, maka Operator Persediaan menginput dalam Aplikasi Persediaan sehingga di Neraca SAIBA muncul Persediaan yang Belum Diregister minus Rp1.500.000,00. Atas hal tersebut, maka dilakukan pencatatan jurnal pada Aplikasi SAIBA untuk mengeliminasi Persediaan yang Belum Diregister dan mencatat beban yang seharusnya.

D	117911	Persediaan yang Belum Diregister	1.500.000
K	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1.500.000

b. Akun Belanja Modal yang digunakan untuk perolehan Barang Persediaan

Pada saat pencatatan realisasi MAK Belanja Modal (MAK 53XXXX) maka secara otomatis akan terbentuk saldo Aset Tetap yang Belum Diregister pada Neraca di Aplikasi SAIBA. Karena pengeluaran ternyata tidak menghasilkan Aset Tetap tetapi menghasilkan Persediaan maka berdasarkan BAST dilakukan perekaman perolehan Persediaan di Aplikasi Persediaan sehingga pada saat rekonsiliasi internal dilakukan maka di Neraca Aplikasi SAIBA akan terbentuk Aset yang Belum Diregister bersaldo **Positif** dan Persediaan yang Belum Diregister bersaldo **Negatif. Atas hal ini seharusnya Satker melakukan revisi anggaran atau ralat dokumen SPM ke KPPN setempat sebelum akhir tahun anggaran.**

Jika sampai dengan akhir periode pelaporan dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja maka dilakukan jurnal di Aplikasi SAIBA melalui menu **Jurnal Umum** dengan jurnal sebagai berikut:

D	117911	Persediaan yang Belum Diregister	xxx
K	13XXXX / 16XXXX	Aset Tetap/ Aset Lainnya yang Belum Diregister	xxx

Namun sebaliknya, Jika pada saat pencatatan realisasi MAK Belanja Persediaan (MAK 521811, 523112, 523121, 523123) tetapi ternyata menghasilkan Aset Tetap maka berdasarkan BAST dilakukan perekaman perolehan Aset Tetap di Aplikasi SIMAK-BMN sehingga pada saat rekonsiliasi internal dilakukan maka di Neraca Aplikasi SAIBA akan terbentuk Aset yang Belum Diregister bersaldo **Negatif** dan Persediaan yang Belum Diregister bersaldo **Positif**.

Jika sampai dengan akhir periode pelaporan dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja maka dilakukan jurnal di Aplikasi SAIBA melalui menu **Jurnal Umum** dengan jurnal sebagai berikut:

D	13XXXX / 16XXXX	Aset Tetap/ Aset Lainnya yang Belum Diregister	xxx
K	117911	Persediaan yang Belum Diregister	xxx

Contoh:

1. Satker ABC masih memiliki realisasi MAK 532111 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin) senilai Rp25.000.000,00 berupa peralatan komputer termasuk didalamnya pembelian toner printer senilai Rp3.000.000,00. Karena tidak digolongkan sebagai Aset Tetap, maka Operator Persediaan menginput toner printer tersebut ke dalam Aplikasi Persediaan sehingga di Neraca SAIBA muncul Persediaan yang Belum Diregister bersaldo negatif senilai Rp3.000.000,00 dan Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister bersaldo positif senilai Rp3.000.000,00. Atas hal tersebut, maka dilakukan pencatatan jurnal pada Aplikasi SAIBA untuk mengeliminasi Persediaan yang Belum Diregister dan Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister.

D	117911	Persediaan yang Belum Diregister	3.000.000
K	113211	Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	3.000.000

2. Satker ABC masih memiliki realisasi MAK 521811 (Belanja Barang Persediaan Konsumsi) senilai Rp20.000.000,00 untuk pembelian perlengkapan asrama yang ternyata didalamnya terdapat pembelian TV LED senilai Rp5.000.000,00. Karena digolongkan sebagai Aset Tetap, maka Operator SIMAK-BMN menginput TV LED tersebut ke dalam Aplikasi SIMAK-BMN sehingga di Neraca SAIBA muncul Persediaan yang Belum Diregister bersaldo positif senilai Rp5.000.000,00 dan Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister bersaldo negatif senilai Rp5.000.000,00. Atas hal tersebut, maka dilakukan pencatatan jurnal pada Aplikasi SAIBA untuk mengeliminasi Persediaan yang Belum Diregister dan Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister.

D	113211	Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	5.000.000
K	117911	Persediaan yang Belum Diregister	5.000.000

8. ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Jenis-jenis Aset Tetap antara lain:

- Tanah
- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi dan Jaringan
- Aset Tetap Lainnya
- Konstruksi Dalam Pengerjaan

Secara umum dalam Laporan Keuangan Ditjen GTK tidak mengalami masalah dalam rekonsiliasi internat dan pengungkapan Aset Tetap, tetapi masih sering terjadi kebingungan pada saat menemui permasalahan sebagai berikut:

- Akun Belanja Modal yang menghasilkan BMN Ekstrakomtabel
- Akun Belanja Modal yang tidak menghasilkan jenis aset yang seharusnya

Penjelasan atas masing-masing permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Akun Belanja Modal yang Menghasilkan BMN Ekstrakomtabel

Pada dasarnya nilai suatu aset tetap adalah seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tetap tersebut siap pakai (konsep nilai perolehan), tidak ada nilai minimumnya. Di pemerintah pusat ada aturan mengenai nilai minimum kapitalisasi aset tetap dimana aset tetap yang nilai perolehannya di atas nilai satuan minimum harus dilaporkan di neraca (intrakomtabel), sedangkan yang tidak memenuhi nilai satuan minimum tetap dibukukan di buku inventaris namun tidak tercantum di neraca (ekstrakomtabel). Jadi dapat disimpulkan BMN Ekstrakomtabel adalah Barang Milik Negara yang harga satuannya berada dibawah nilai kapitalisasi sehingga tidak tercatat dalam Neraca, tetapi tetap tercatat di daftar asset ekstrakomtabel. **Untuk melihat apakah terdapat barang Barang Ekstrakomtabel, Operator SAIBA dapat meminta Daftar Barang Ekstrakomtabel kepada Operator SIMAK-BMN.**

Atas hal tersebut maka dilakukan jurnal di Aplikasi SAIBA melalui menu **Jurnal Penyesuaian** dengan kategori "**Koreksi Beban Aset**" dengan jurnal sebagai berikut:

D	595XXX	Beban Aset Esktrakomtabel.....	XXX
K	13XXXX / 16XXXX	Aset Tetap/ Aset Lainnya yang Belum Diregister	XXX

Contoh:

Satker ABC melakukan kegiatan pembelian kursi sebanyak 100 buah @Rp250.000,00 menggunakan akun 532111 senilai Rp25.000.000,00. Pada saat pencatatan realisasi belanja di Aplikasi SAIBA secara otomatis akan membentuk Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister senilai Rp25.000.000,00. Tetapi pada saat perekaman di Aplikasi SIMAK-BMN, kursi tersebut secara otomatis akan **dimasukkan ke dalam Daftar Barang Ekstrakomtabel bukan di Neraca** sehingga tidak ada jurnal yang dikirim ke Aplikasi SAIBA. Hal tersebut mengakibatkan akun Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister senilai Rp25.000.000,00 tidak bisa dieliminasi secara otomatis. Oleh karena itu dilakukan pencatatan **Jurnal Penyesuaian** di Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D	595112	Beban Aset Esktrakomtabel Peralatan dan Mesin	25.000.000
K	133211	Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	25.000.000

b. Akun Belanja Modal yang tidak menghasilkan jenis aset yang seharusnya

Idealnya, suatu Belanja Modal akan menghasilkan aset yang sesuai dengan MAK yang telah dituangkan dalam RKAKL. MAK Belanja Modal Peralatan dan Mesin seharusnya menghasilkan Aset Peralatan dan Mesin, MAK Belanja Modal Gedung dan Bangunan seharusnya menghasilkan Aset Gedung dan Bangunan, dan seterusnya. Tetapi pada prakteknya sering terjadi penggunaan MAK yang tidak sesuai dengan jenis aset yang dihasilkan. Misalnya realisasi dari MAK Peralatan dan Mesin (532111) menjadi Aset Jalan yang seharusnya dianggarkan dari MAK Jalan, Irigasi, Jaringan (534111).

Hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi antara bagian perencanaan dan bagian BMN/ Rumah Tangga pada saat perencanaan anggaran sehingga akan menimbulkan permasalahan pada saat rekonsiliasi internal dilakukan yang akan tampak seperti dalam Neraca berikut ini:

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan : NSAI/ET
Tanggal : 24/05/2018
Halaman : 1

KE MENTERIAN NE GARA/LEMBAGA : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT ORGANISASI : 16 DITJEN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
WILAYAH/PROPINSI :
SATUAN KERJA :
JENIS KEWENANGAN :

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2017	2016	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	5,680,320	(5,680,320)	(100.00)
Persediaan	66,015,268	16,281,852	49,733,416	305.45
JUMLAH ASET LANCAR	66,015,268	21,962,172	44,053,096	200.58
ASET TETAP				
Tanah	44,114,602,220	44,114,602,220	0	0.00
Peralatan dan Mesin	22,185,861,949	16,692,880,221	5,492,981,728	32.90
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	170,504,851	0	170,504,851	0.00
Gedung dan Bangunan	36,899,595,426	15,707,634,584	21,191,960,842	134.91
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,015,801,551	619,139,200	396,662,351	64.06
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	(170,504,851)	0	(170,504,851)	0.00
Aset Tetap Lainnya	903,553,570	903,553,570	0	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	755,815,962	(755,815,962)	(100.00)
Akumulasi Penyusutan	(17,878,465,976)	(14,762,653,644)	(3,115,812,332)	21.10

Untuk mengeliminasi hal tersebut maka dilakukan jurnal di Aplikasi SAIBA melalui menu **Jurnal Umum** dengan jurnal sebagai berikut:

D	134213	Jaringan yang Belum Diregister	170.504.851
K	132211	Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	170.504.851